



LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT									
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									
1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
1.1.Peningkatan Peran Pelabuhan Perikanan sebagai Pusat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	1. Pelabuhan Perikanan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelabuhan Perikanan Kema di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; 3. Pelabuhan Perikanan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber lain yang sah)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Pemerintah Daerah (Pemda)					

1.2.Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
1.2. Peningkatan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan	4. Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 5. Pelabuhan Perikanan Goto di Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara; 6. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 7. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen PUPR dan Pemda					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	Provinsi Sulawesi Utara; dan 8. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.								
2. Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya									

2.1. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.1. Pengembangan Jaringan Prasarana dan Sarana pada Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya	1. Kabupaten Minahasa Tenggara; 2. Kabupaten Minahasa; 3. Kota Bitung; 4. Kota Ternate; dan 5. Kabupaten Halmahera Selatan.	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemda					
2.2. Pengembangan dan Efektivitas Usaha pada Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Pemda					

2.3. Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.3. Penataan Konektivitas dan Peran Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Pemda					
3. Pengembangan Sentra Industri Maritim									
3.1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sentra Industri Maritim	Kota Bitung	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin),					

Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
				Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Pemda					
3.2. Pengembangan Kegiatan yang Berbasis Industri Maritim yang Diselaraskan Dengan Pusat-Pusat Kegiatan Nasional		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemda					
4. Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan									

4.1. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
4.1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kota Bitung	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemda					
4.2. Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang Diselaraskan Dengan Pusat-Pusat Kegiatan Nasional		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemda					
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut									

1. Tatanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1. Tataan Kapelabuhanan Nasional									
1.1. Pengembangan Konektivitas Pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda	Kemen PUPR					
1.2. Peningkatan Fungsi dan Peran Pelabuhan Laut		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda						
1.3. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Laut		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda	Kemen PUPR					

3. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	3. Pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; 4. Pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; 5. Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;								

6. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	6. Pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; 7. Pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; 8. Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;								

9. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	9. Pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; 10. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; 11. Pelabuhan Bataka di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; 12. Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;								

13. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	13. Pelabuhan Matui di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; 14. Pelabuhan Babang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 15. Pelabuhan Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 16. Pelabuhan Indari di Kabupaten Halmahera Selatan,								

Provinsi . . .



- 14 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	Provinsi Maluku Utara; 17. Pelabuhan Koititi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 18. Pelabuhan Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 19. Pelabuhan Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;								

20. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	20. Pelabuhan Loleo Jaya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 21. Pelabuhan Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 22. Pelabuhan Pigaraja di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;								

23. Pelabuhan . . .



- 16 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	23. Pelabuhan Posi-Posi Gane di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 24. Pelabuhan Pulau Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 25. Pelabuhan Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;								

26. Pelabuhan . . .



- 17 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	26. Pelabuhan Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 27. Pelabuhan Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 28. Pelabuhan Dama di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;								

29. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	29. Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; 30. Pelabuhan Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 31. Pelabuhan Tikong di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;								

32. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	32. Pelabuhan Bastiong di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 33. Pelabuhan Mangga Dua di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 34. Pelabuhan Moti di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 35. Pelabuhan Tifure di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;								

36. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	36. Pelabuhan Ternate/A.Yani di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 37. Pelabuhan Gita/Payahe di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; 38. Pelabuhan Maidi/Lifofa di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;								

39. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
	39. Pelabuhan Soasio/Goto di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan 40. Pelabuhan Sofifi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.								
2. Alur Pelayaran									

2.1.Pengendalian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
2.1. Pengendalian Aktivitas dan Intensitas Kegiatan Pelayaran Pada Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia secara Efektif dan Berkesinambungan	Alur Laut Kepulauan Indonesia III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub						
2.2. Penyelenggaraan Hak Lintas Alur Kepulauan	Alur Laut Kepulauan Indonesia III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub						
2.3. Peningkatan Efektifitas Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia dengan Memperhatikan Pelaksanaan	Alur Laut Kepulauan Indonesia III	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub						

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

PROGPAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
Perlindungan Lingkungan Laut									
3. Kabel Bawah Laut									
3.1. Penetapan dan Pengendalian Aktivitas Pemasangan Alur Kabel Bawah Laut Secara Efektif dan Ramah Lingkungan dengan Pemanfaatan Ruang Lainnya	1. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara; 2. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan 3. sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku Utara.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)					

3.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
3.2. Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan, Pemantauan, dan Pengamanan Alur Kabel Bawah Laut Secara Efektif		APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kemen BUMN dan instansi non-pemerintah					
II. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN									
A. Kawasan Pemanfaatan Umum									
1. Zona Pariwisata									

1.1. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pariwisata	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf)						
1.2. Penetapan Peruntukan Ruang Laut untuk Kegiatan Wisata Bahari	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf	KKP					

1.3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1.3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kegiatan Wisata Bahari	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					
1.4. Optimalisasi Pemanfaatan Zona di dalam Kawasan Konservasi dan Cagar Budaya Maritim untuk Wisata Bahari	kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek)					
1.5. Pengembangan Destinasi Wisata Bahari yang Baru	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemen PUPR dan KKP					

2. Zona . . .



- 27 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2. Zona Perikanan Tangkap									
2.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
2.2. Modernisasi Teknologi Perikanan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)					

2.3. Modifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.3. Modifikasi Alat Penangkapan Ikan yang Tidak Merusak Lingkungan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	BRIN					
2.4. Pengaturan Kelembagaan yang Efektif untuk Pemulihan Degradasi Habitat Pendukung	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)					

2.5. Penegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.5. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan TNI					
2.6. Pengalokasian Ruang untuk Kegiatan Perikanan Tangkap Nelayan Tradisional	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

2.7. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENAUNGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
2.7. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Daerah Penangkapan Ikan dan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan serta Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Bakamla, Kemenhan, dan TNI					

2.8. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
2.8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Berupa Praktek-Praktek Kearifan Lokal	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
2.9. Pelestarian Budaya dan Adat Masyarakat Pesisir di Laut Maluku	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

3. Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
3. Zona Perikanan Budidaya									
3.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Budi Daya	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
3.2. Pengalokasian Ruang Laut untuk Pengembangan Budi Daya Perikanan Laut Lepas Pantai	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

3.3. Akselerasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
3.3.Akselerasi Investasi dan Promosi dalam Rangka Optimalisasi Zona Budi Daya Perikanan Laut Lepas Pantai	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)					
3.4.Optimalisasi Kapasitas Zona Dan Rekayasa Teknologi dalam Pengembangan Kegiatan Perikanan Budi Daya Laut Secara Lestari	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	BRIN					

dan . . .



- 34 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
dan Ramah Lingkungan									
4. Zona Pengelolaan Energi									
4.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pengelolaan Energi Baru dan Energi Terbarukan	zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM	Kemen BUMN					

4.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
4.2. Peningkatan Kegiatan Pemanfaatan Energi Angin, Arus Laut, Pasang Surut, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut	zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM	Kemen BUMN					
5. Zona Pertahanan dan Keamanan									
A. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	TNI					

B. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
B. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pertahanan Keamanan di Laut	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemen PUPR					
C. Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum dengan Negara Tetangga di Kawasan Perbatasan Laut	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan TNI					

D. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
D. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Pengawasan Kegiatan di Wilayah Perbatasan	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan					
E. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Menyelenggarakan Pengawasan di Laut Dalam Satu	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	KKP, TNI, dan Bakamla					

Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
Sistem Pengawasan Terpadu									
F. Peningkatan dan Penambahan Jumlah Stasiun Pengawasan dan/atau Sistem Lain yang Terintegrasi Dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Terutama di Titik-Titik Pintu Masuknya Kapal Perikanan Berbendera Asing ke Indonesia	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	KKP, TNI, dan Bakamla					

G. Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
G. Pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Bagi Kapal Perikanan Berukuran 30 GT ke Atas	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
H. Penguatan Prasarana dan Sarana atau Instrumen Pengawasan Masyarakat Dengan melengkapi Prasarana dan Sarana Pengawasannya	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan	Kemen PUPR					

III. PERWUJUDAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
III. PERWUJUDAN KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL									
A. Pengalokasian Ruang Laut Mendukung Pelaksanaan Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN, dan Kemenperin					
B. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenko Perekonomian	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN dan Kemenperin					

IV. PERWUJUDAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
IV. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI									
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									
Pengembangan Pelabuhan Perikanan									
1. Peningkatan Konektivitas dan Intensitas Kegiatan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pemanfaatan	1. Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; 2. Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

Alur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
Alur Pelayaran di Wilayah Perairan	Provinsi Maluku Utara; dan 3. Pelabuhan Perikanan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.								
2. Peningkatan Peran dan Keterkaitan Pelabuhan Perikanan dalam Pengembangan Kawasan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut									
Kabel Bawah Laut									

1. Penetapan . . .



- 43 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1. Penetapan Koridor Pemasangan dan/atau Penempatan Kabel Bawah Laut Secara Selaras Dengan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya	sebagian perairan sebelah utara perairan Provinsi Maluku Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kemenkominfo, Kemen ESDM, dan Kemen BUMN					
2. Pengawasan, Pengamanan, dan Perawatan Jaringan Kabel Bawah Laut	sebagian perairan sebelah utara perairan Provinsi Maluku Utara	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kemenkominfo, Kemen ESDM, dan Kemen BUMN					

V. PERWUJUDAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
V. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI									
Perikanan Tangkap									
1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
2. Perluasan Orientasi Kegiatan Penangkapan Ikan di Daerah Penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif Secara Lestari dan Ramah Lingkungan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

3. Optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
3. Optimalisasi Kegiatan Penangkapan Ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
4. Pengendalian Kapasitas dan Intensitas Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan yang Memiliki Kepadatan Dan Intensitas Tinggi Secara Lestari dan Ramah Lingkungan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

5. Modernisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
5. Modernisasi dan/atau Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	BRIN					
6. Integrasi Kebijakan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas di Zona Ekonomi Eksklusif dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh Dengan Sediaan Ikan di Wilayah Perairan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

7. Peningkatan . . .



- 47 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
					I	II	III	IV	V
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
7. Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Aman, Efektif dan Berkelanjutan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen PUPR					

8. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
8. Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenhan, TNI, dan Bakamla					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 067479 C